**PROBLEMATIKA ANAK ANGKAT DENGAN STATUS ANAK KANDUNG**

**(TINJAUAN HUKUM MUNAKAHAT)**

Oleh : Fitria Rahmi, MA

1. Latar Belakang Masalah

Dalam Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah disebutkan bahwa salah satu kenikmatan terbesar yang diberikan oleh Allah kepada manusia Adalah dengan Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar merasa tenang dan menciptakan anak-anak dan cucu-cucu yang akan meneruskan keturunan dan kehidupan di muka bumi, [[1]](#footnote-1) sebagai penafsiran dari surat An Nahl ayat 72 :

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَۙ

**Artinya :**

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkapri nikmat Allah?

Pernikahan merupakan cara yang ditentukan Allah untuk menyatukan laki-laki dan perempuan menjadi suami dan isteri yang sah menurut agama hingga menjadikan baginya anak dan cucu. Bahkan dalam salah satu hadits Rasulullah SAW bersabda :

“Nikahilah perempuan-perempuan yang bersifat penyayang dan subur (banyak anak), karena aku akan berbangga-bangga dengan (jumlah) kalian di hadapan umat-umat lainnya kelak pada hari kiamat.” (HR Ahmad, ibnu Hibban, dan Thabrani)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami isteri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT. Namun tidak semua pasangan suami isteri yang dianugerahi anak oleh Allah SWT dari Rahim isterinya sendiri. Dan mereka ; sebahagian suami isteri yang tidak mendapatkan keturunan tersebut tidak puas dengan apa yang dialaminya sehingga berbagai usaha dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu cara yang mereka tempuh adalah dengan tindakan mengadopsi (*tabanni)* atau pengangkatan anak.[[2]](#footnote-2)Pengangkatan anak, bukan hanya dilakukan oleh suami isteri yang tidak mempunyai keturunan, tetapi juga oleh yang lainnya yang menginginkan.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga yang sah/walinya yang sah/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan kekuasaaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Negeri.[[3]](#footnote-3)

Menurut hukum Islam ; pengangkatan anak bertujuan utama untuk kepentingan kesejahteraan si anak angkat dan bukan melanjutkan keturunan. Dalam hal ini status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum sedikit pun. Ia tetap anak dan kerabat dari orang tua kandungnya berikut segala akibat-akibat hukumnya. Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada al-Quran dan Sunah serta hasil Ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan Pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya Kompilasi Hukum Islam (KHI).

**Namun tindakan pengangkatan anak/adopsi anak yang dilakukan oleh masyarakat telah menjurus kearah pelanggaran hukum dan pelanggaran hak-hak anak. Hal ini salah satunya dikarenakan orang tua angkat menasabkan anak angkatnya kepada dirinya bahkan mengubah status anak angkatnya menjadi anak kandung berdasarkan akta kelahiran. Sehingga dengan demikian terjadi pengaburan status asal-usul anak yang di angkat. Hal ini juga akan mengacaukan nasab sehingga dapat berakibat pelanggaran kepada hukum Islam dan juga hukum munakahat karena dengan terjadinya kekacauan nasab akan berimplikasi terjadinya pernikahan senasab atau bahkan juga akan terjadi kekacauan urutan perwalian. Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh problematika (kekacauan-kekacauan yang akan terjadi) terhadap hukum Munakahat dari tindakan orang tua angkat yang menjadikan anak kandung dalam akte kelahirannya.**

1. **Pengertian Adobsi/Pengangkatan anak**

Secara etimologis pengangkatan anak dalam Bahasa Arab dari kata *tabanni* berarti mengambil anak, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “Adopsi” yang berarti “pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri”.6 Istilah “*Tabanni”* yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat.[[4]](#footnote-4)

Secara terminologi *tabanni* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak (*tabanni*) “pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya. Dalam pengertian lain *tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan Hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.[[5]](#footnote-5)

Dari berbagai istilah yang ada tersebut, istilah dalam bahasa indonesia adalah “pengangkatan anak”. Istilah “pengangkatan anak” digunakan dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukum mengangkat anak, istilah untuk anak yang di angkat disebut “anak angkat”, sedangkan istilah untuk orang tua yang mengangkat anak disebut “orang tua angkat”. Istilah hukum pengangkatan anak, anak angkat, anak angkat dan orang tua angkat tersebut merupakan istilah hukum yang digunakan dalam perundang undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, antara lain Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Demikian pula dalam yurisprudensi maupun doktrinn yang tersebar dalam kepustakaan hukum.

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (9) mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pengangkatan **Anak** adalah suatu perbuatan **hukum yang** mengalihkan seorang **anak** dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali **yang** sah atau orang lain **yang** bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan **anak** tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. (Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007).

1. **Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**

Pengangkatan anak dalam Islam pada dasarnya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Yaitu peristiwa pengangkatan Zaid bin Haritsah yang diadopsi oleh Nabi Muhammad saw. Disahkan bahwa ketika muda Zaid diculik oleh rombongan berkuda dari suku Tihamah. Ia dibawa ke Mekah dan dibeli oleh Hakim bin Hiza, keponakan Khadijah binti Khuwailid. Zaid kemudian diserahkan  kepada Khadijah lalu diberikan kepada nabi saw sebagai hadiah.

Setelah sekian lama tinggal bersama Nabi Muhammad saw, Zaid ditemukan oleh kakeknya yang ingin membawanya kembali ke rumah dan ia bersedia membayar tebusan kepada nabi saw seandainya itu dibolehkan. Nabi Muhammad saw kemudian mengatakan bahwa ia tidak meminta imbalan, akan tetapi serahkan saja semua keputusan kepada Zaid, apakah ia mau kembali atau tetap bersamanya).

Alkisah, Zaid memilih tinggal bersama Nabi Muhammad saw di Mekah dan enggan kembali kepada keluarganya. Nah, ketika itulah Rasulullah saw mengumumkan kepada masyarakat Mekah bahwa Zaid adalah putranya. Beliau berkata, “Wahai orang-orang Quraisy! Saksikanlah bahwasanya ia (Zaid) adalah anakku yang akan mewarisiku dan aku akan mewarisinya.” Sejak itulah Zaid dikenal sebagai Zaid bin Muhammad.

Panggilan tersebut terus melekat pada Zaid hingga turun surat Al-Ahzab [33] ayat 4-5. Hal ini diterangkan oleh Ibnu Umar, “Sesungguhnya Zaid bin Haritsah, budak Rasulullah saw, dulu tidaklah kami memanggilnya kecuali dengan nama Zaid bin Muhammad, sampai turun Al-Qur’an (yang artinya), “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah.” (HR. Bukhari no. 4782).

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚوَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰـِٕۤيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚوَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاۤءَكُمْ اَبْنَاۤءَكُمْۗ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۗوَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ ٤

“*Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)*.” (QS. Al-Ahzab [33]: 5).

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَاۤىِٕهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَاۤءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ۗوَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَأْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۗوَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ٥

“*Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang*.” (QS. Al-Ahzab [33]: 5).

Menurut [Quraish Shihab](http://quraishshihab.com/), surat Al-Ahzab [33] ayat 4 berfungsi untuk membatalkan adopsi/pengangkatan anak yang dilakukan nabi dan semua adopsi/pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat muslim. Setelah itu, Nabi Muhammad saw memperingatkan semua agar tidak mengaku mempunyai keturunan dengan satu pihak padahal sebenarnya tidak. Beliau bahkan bersabda, “Siapa yang mengakui seseorang yang bukan bapaknya sebagai bapaknya, maka surga baginya haram.” (HR. Bukhari dari Sa’id bin Abi Waqqas).

Ayat inilah yang kemudian dijadikan mayoritas ulama sebagai dalil bahwa **mengadopsi anak dalam arti menasabkan kepada orang tua angkatnya dilarang bahwa mengadopsi anak itu dibatalkan oleh Al-Qur’an dan hadis**. Karena memiliki sisi kemudaratan seperti ketidakjelasan nasab dan pewarisan. Selain itu, jikalau memang ingin membantu si anak, maka bisa dilakukan dengan cara yang lebih efektif. Menurut Quraish Shihab, ayat ini juga merupakan penegasan Allah swt kepada umat Islam untuk mengikis tradisi adopsi anak yang telah mengakar sejak masa jahiliyah.[[6]](#footnote-6)

Hal ini menjadikan *Tabbani*  istilah menurut Wahbah al Zuhaili pengertian Pengangkatan Anak (*tabbani*) Adalah Pengambilan anak Yang jelas nasabnya yang dilakukan oleh seseorang, lalu anak tersebut di nasabkan untuk dirinya. Dalam istilah lain, *tabbani* Adalah seorang laki-laki maupun perempuan yang dengan berniat menasabkan seorang anak kepada dirinya walaupun anak tersebut sudah memiliki nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dengan pengertian di atas sudah jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka dari itu menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.[[7]](#footnote-7)

Jadi Pengangkatan anak dalam Hukum Islam terbatas pada perlakuan sebagai anak dari segi menyayangi, memelihara, memberikan nafkah, pendidikan dan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu mengangkat (adopsi) anak dengan memberikan status yang sama kepada anak angkat dengan anak kandungnya.

Pengangkatan (adopsi) anak menurut hukum Islam hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kebutuhan sebagai berikut: ***Pertama***, Tidak memutuskan hubungan darah dengan anak diangkat terhadap orang tua kandung dan keluarga, dari ketentuan ini jelas melarang untuk mengangkat anak dengan maksud menjadikan anak kandung dalam segala hal yang akan menghilangkan atau memutuskan hubungan atau kedudukan hak orag tua kandung dan dapat merombak ketentuan mengenai waris. ***Kedua*,** Anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, sebaliknya tetap sebagai pewaris orang tua kandungnya, lalu orang tua angkat tidak berhak sebagai pewaris dari anak angkatnya. ***Ketiga***, Anak angkat tidak berhak menggunakan nama orang tua angkatnya kecuali sekedar tanda pengenal/alamat. ***Keempat***, Orang tua angkat tidak bisa bertindak sebagai Wali dalam Pernikahan anak angkatnya.[[8]](#footnote-8)

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pengangkatan anak (adopsi) dalam hukum Islam bersifat memelihara anak dengan tujuan agar anak tersebut tidak terlantar dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Pengasuhan anak lebih ditujukan terhadap orang tua anak yang tidak mampu atau tidak dapat menjamin terselenggaranya hak-hak anak baik fisik, spiritual, mental maupun sosialnya. Maka, pengasuhan tersebut termasuk, pemeliharaan anak, mendidik anak, mencerdaskan pikirannya dan mengarahkan bakatnya untuk mempelajari keterampilan, hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Dalam hukum Positif, ada Pengaturan Khusus terkait pengangkatan anak yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 39 yaitu:

1. Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.

(2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.

1. Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
2. Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

(4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat

1. Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Ketika terjadi Perbuatan orang tua angkat yang mengubah status anak angkatnya menjadi anak kandung berdasarkan akta kelahiran, merupakan perbuatan melawan atau melanggar hukum atau tindak pidana, seperti yang diatur pada Pasal 93, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan:

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menurut [fatwa MUI](http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/09.-Adopsi-pengangkatan-anak.pdf), mengangkat anak dalam arti mengubah nasab dari ayah dan ibu kandungnya memang dilarang. Sedangkan adopsi anak tanpa mengubah nasab yang dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.

Jadi, tidak mengapa seandainya pasangan suami istri ingin merawat seorang anak seperti anaknya mereka sendiri. Hanya saja – sebagai catatan – nasab dan identitas anak tersebut tidak boleh dirubah. Selain itu, berbagai konsekuensi hukum juga tetap harus dipatuhi sebagaimana adanya, seperti tidak ada waris mewaris, tidak ada mahram, tidak ada perwalian dan sebagainya. *Wallahu a’lam*.

**III. Problematika Pernikahan Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Orang Tua Angkat (Tinjauan Hukum Munakahat)**

1. **Adanya Kemungkinan Terjadinya Pernikahan Senasab**

Ketika anak angkat diputuskan hubungannya dengan ayah kandungnya, dan memindahkan nasabnya kepada orang tua angkat kemudian anak angkat tersebut tidak tahu dengan ayah kandungnya sendiri, dan juga tidak mengenal saudara-saudaranya dan kerabatnya yang lain, maka akan sangat mungkin terjadi pernikahan senasab seperti sesama saudara, atau dengan yang lainnya yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk menikahinya. Hal ini tidak hanya putus dengan anak angkat yang kemungkinan akan menikahi saudaranya sendiri tetapi akan berimbas terus sampai anak cucunya yang kemungkinan juga akan menikahi orang-orang yang jelas-jelas haram untuk dinikahi.

Sebagaimana kita tahu yang diharamkan karena nasab untuk dinikahi adalah ibu, puteri, saudari, saudari bapak (bibi), saudari ibu (bibi dari pihak ibu), puteri dari saudara kita yang laki-laki dan puteri dari saudara kita yang perempuan. Lihat juga penjelasan masing-masingnya nanti. Selain yang disebutkan itu halal dinikahi (*uhilla lakum maa waraa’a dzaalikum*) seperti puteri paman dari bapak (*‘amm*) dan puteri bibi dari bapak (*‘ammah*), demikian pula puteri paman dari ibu (*khaal*) maupun puteri bibi dari ibu (*khaalah*).

Seperti dijelaskan dalam Surat An Nisa Ayat 22-23

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).*

*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Pernikahan senasab juga dilarang pada hokum positif, di Indonesia seperti yang tercantum pada UU No1 Tahun 1974 pasal 8 yaitu: Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara. Antrara seseorang dengan saudara tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya. Sedangkan perkawinan-perkawinan yang dilarang dalam KHI tercantum pada pasal 39.

**2. Kekacauan Perwalian**

Kemungkinan masalah yang lain yang akan terjadi ketika anak angkat dinasabkan kepada ayah angkatnya bahkan tertera di akte kelahirannya Adalah masalah perwalian. Berdasarkan pendapat jumhur ulama, keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mutlak atau harus ada dan [hukum pernikahan](https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-pernikahan) tanpa wali adalah tidak sah. Pernikahan tanpa adanya wali tersebut haruslah dihindari. Saat akan menikah hendaknya pihak perempuan telah memiliki wali dan ini berlaku pada semua perempuan termasuk semua perempuan yang masih kecil atau dewasa, baik perawan atau sudah janda. Dan apabila syarat ini tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW

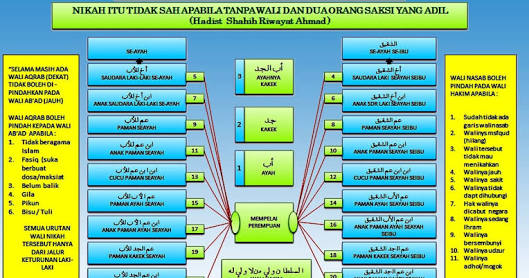
“Dari Aisyah Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam bersabda, “perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka berselisih; maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.”(HR. Al-Arba’ah)

Dan juga disebutkan dalam hadits berikut ini :

“Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radhiyallahu Anhum bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,”Tidaklah sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali.”(HR. Ahmad dan Al-Arba’ah)

Hadits tersebut menjelaskan bahwa tidak ada suatu pernikahanpun yang dilaksanakan tanpa adanya seorang wali dan pernikahan tanpa wali tersebut hukumnya tidak sah. Meskipun terdapat perbedaan pendapat antara ulama, hukum pernikahan tanpa wali nikah tetaplah tidak diperbolehkan.

Kemungkinan yang terjadi, ketika anak angkat dinasabkan kepada ayah angkatnya adalah akan terjadi kekacauan persoalan wali nikah. Jika anak perempuan sebagai anak angkat, maka akan berpeluang tidak dinikahkan oleh wali yang sah dan pernikahannya juga akan menjadi tidak sah. Dan hal ini tidak hanya kemungkinan terjadi pada diri anak angkat itu sendiri dan akan berlanjut kepada keturunannya, anak dan cucu yang dimilikinya nanti juga akan dinikahkan atau menikahkan (menjadi wali) bagi orang-orang yang seharusnya sebagai wali yang sah. Jika anak angkat laki-laki dimungkinkan dia akan menjadi wali Saudara Perempuannya sendiri, tetapi ketika hubungannya diputus dengan keluarganya, kemungkinan Saudaranya dinikahkan oleh wali yang bukan haknya. Dan ini juga berlanjut kepada anak cucunya yang mungkin akan menikahi atau menjadi wali bagi orang-orang yang tidak seharusnya. Bisa dibayangkan, **berapa kekacauan nasab yang akan ditimbulkan dan berapa pernikahan yang tidak sah akan terjadi dari menasabkan anak angkat kepada anak kandung**. Berikut urutan wali.



**IV. Kesimpulan dan Saran**

1. Kesimpulan

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga yang sah/walinya yang sah/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan kekuasaaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Negeri.

Pengangkatan anak dibolehkan dalam Islam dan juga dibolehhkan berdasarkan Hukum Positif di Indonesia, dengan catatan tidak memindahkan nasabnya kepada orang tua angkat. Pengangkatan anak hanya bertujuan untuk kesejahteraan anak tanpa memutuskan hubungan anatara anak angkat dengan orang tua dan keluarganya.

Adanya kasus yang menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat, akan mengacaukan Hukum islam termasuk Hukum Munakahat yaitu perihal dikhawatirkan akan terjadinya Pernikahan Senasab dan juga dikhawatirkan persoalan perwalian. Pernikahan senasab diharamkan dalam Islam dan juga Perwalian sudah diatur sedemikian rupa dalam Hukum Munakahat.

1. Saran

Makalah ini masih jauh dari kesempurnaan dan mohon saran dan kritikan untuk kesempurnaan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Habiburrahman, 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*.

Jakarta, Prenada Media group.

Kamil, dan M.Fauzan, Ahmad, 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada .

Mulyadi, Lilik. 2006. *Pergeseran Perspektif dan Praktif dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan*. Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 246 Mei 2006, Ikahi, Jakarta.

Prinst, Darwan. 2003. *Hukum anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Pandika, Rusli. 2012.*Hukum Pengangkatan Anak.* Jakarta: Sinar Grafika. Sayyid Sabiq*,* Sayyid . 2007. *Fiqh Sunnah.* Jakarta:Pena Pundi Aksara. Zaini, Muderis. 1992. *Adopsi suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum,*

Jakarta: Sinar grafika.

1. https://tafsirweb.com/4420-surat-an-nahl-ayat-72.html [↑](#footnote-ref-1)
2. Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Aspek Sistem Hukum,* (Jakarta : Sinar Grafika), 1992, h. 1 [↑](#footnote-ref-2)
3. Erna Sofwan Sjukrie, 1992, *Lembaga Pengangkatan Anak,* Mahkamah Agung RI, hlm. 17 [↑](#footnote-ref-3)
4. Musthofa, *Pengangkatan Anak, Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 9 [↑](#footnote-ref-4)
5. Andi Samsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam,* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 19-20 [↑](#footnote-ref-5)
6. Quraish Sihab, “*Tafsir al Misbah”*, (11) :221 [↑](#footnote-ref-6)
7. Kamil dan Fauzan, Ahmad, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010, h. 95 [↑](#footnote-ref-7)
8. Habiburrahman, 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. h. 157 [↑](#footnote-ref-8)